
PEMBERDAYAAN TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN (UPTD PONSOS KALIJUDAN) DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

Arief Adhityanto Prakoso

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Disability empowerment is central to developing countries. Empowerment needs to be done to those who are unable to obtain a decent life like most normal people in this case people with mental disabilities. The purpose of this study is to describe about how the process of empowerment of children with mental disabilities in self-development of the UPTD Pondok Sosial Kalijudan, and what are the obstacles in the empowerment of children with a tunagrahita in the development of self potential in UPTD Pondok Sosial Kalijudan This research uses qualitative research methods with descriptive research type. Data collection techniques used with the method of observation, documentation, and in-depth interviews with 7 different background informants. Determination of informants is done by purposive where the parties are considered to know and be involved in the empowerment of children with a tunagrahita in the development of their potential in UPTD Pondok Sosial Kalijudan. Data obtained from the interviews were analyzed by reducing, presenting, and drawing conclusions. The results showed that the empowerment of children with a tunagrahita have been able to explore and develop the potential that is owned by the mentally tunagrahita children. However, there are still things that become obstacles that need to be improved so that in the future UPTD Pondok Sosial Kalijudan become better.

Keywords: Empowerment, Mental Disabilities, UPTD Pondok Sosial Kalijudan

Pendahuluan

Penyandang disabilitas perempuan dan laki-laki dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam negara-negara maju dan berkembang, mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dengan peluang lapangan kerja yang lebih besar kepada para penyandang disabilitas membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dasar, pelatihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, minat dan kemampuan mereka dengan berbagai adaptasi yang diperlukan. Banyak masyarakat juga mengakui adanya kebutuhan untuk mendobrak hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas agar membuat lingkungan fisik yang lebih aksesibel, serta mampu memberikan informasi dalam beragam bentuk juga sikap yang menandatangani asumsi yang salah mengenai penyandang disabilitas.

. Sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas, atau lebih dari satu miliar orang, sehingga terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan di setiap negara, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau, secara lebih luas, dalam aspek keuangan non-moneter seperti standar hidup, misalnya pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan. Para penyandang disabilitas kerap

kali terkucil dari pendidikan, pelatihan kejuruan dan peluang kerja. Lebih dari 90% anak-anak dengan disabilitas di negara-negara berkembang tidak bersekolah (UNESCO) sementara hanya 1% perempuan disabilitas yang bisa membaca (UNDP).

Selama dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan masih sangat tinggi di banyak wilayah Indonesia dan mengalami ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi dan rentan, termasuk para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan - layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik, Satuan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2011, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah: 171,755,077 orang. Sejalan dengan penghitungan WHO, diperkirakan 10% dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas. Menurut Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) dari Kementerian Sosial tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang

disabilitas mental) dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis).

Pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Konvensi Hak - Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 164 negara, termasuk Indonesia. Menurut UNCRPD, disabilitas merupakan hasil interaksi antara keterbatasan fungsi individu (mobilitas, penglihatan, pendengaran, dan komunikasi) dengan kondisi lingkungan sekitar yang menghambat partisipasi aktif dan efektif dalam masyarakat. Artinya, individu yang memiliki keterbatasan fungsi (impairment) akan menjadi disabilitas ketika berhadapan dengan hambatan lingkungan (disabled), seperti fasilitas yang tidak aksesibel, tidak tersedianya alat bantu atau persepsi negatif masyarakat. Dengan kata lain, disabilitas tidak sama dengan diagnosa medis yang menjelaskan kondisi keterbatasan fungsi, tetapi lebih menjelaskan bagaimana individu dapat berfungsi dalam lingkungannya. Dampak disabilitas di berbagai sektor telah menjadikannya sebuah fenomena yang kompleks ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungannya (hambatan), maka akses untuk mendapatkan pelayanan publik pun akan terbatas dan akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas, terutama dalam kegiatan sosial ekonomi. Rendahnya tingkat partisipasi berimplikasi terhadap tingginya angka kemiskinan yang selanjutnya akan meningkatkan risiko penyandang disabilitas. Anak dengan disabilitas tidak memperoleh pendidikan layak dan orang dewasa dengan disabilitas tidak mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan orang non disabilitas. Hal tersebut merupakan contoh riil yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini.

Angka kesejahteraan sosial di Indonesia masih dapat dikatakan rendah, hal tersebut dilihat dari banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri misalnya, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada Tahun 2013 terdapat 1.872.862 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan akibat bencana alam.

Sedangkan menurut data dari Kementerian Sosial, pada tahun 2016 Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua jumlah PMKS terbanyak se Indonesia dan dengan jumlah Panti yang terbanyak di Indonesia. Pada data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti berdasarkan

Kepmensos Nomor 178/HUK/2016, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penyandang PMKS sebesar 35.367 Jiwa, dibawah Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penyandang PMKS sebesar 40.982 jiwa. Sedangkan dalam jumlah Panti Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 1.137 Panti dan disusul oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 855 Panti.

Salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah penyandang cacat. Kota Surabaya, jumlah penyandang cacat menurut Dinas Sosial Kota Surabaya pada Tahun 2013 sebesar 4.090 jiwa yang terdiri dari 354 jiwa tuna netra, 472 jiwa tuna wicara/rungu, 1.785 jiwa cacat anggota badan dan 1.479 cacat mental/tunagrahita. Penyandang cacat atau disabilitas menurut Undang-undang No 4 Tahun 1997 didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang termasuk penyandang disabilitas dalam hal ini adalah penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, serta disabilitas fisik dan mental, yang termasuk penyandang disabilitas mental yaitu tunagrahita.

Di Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan memiliki jumlah anak berkebutuhan khusus yang angkanya besar. Selain hal itu di kota yang besar seperti Surabaya kehidupan mereka juga tidak dalam keadaan yang baik. Kondisi ekonomi keluarga serta penolakan dari lingkungan menjadi tantangan bagi mereka sedangkan mereka adalah anak biasa yang memerlukan perhatian atau kasih sayang baik dari orang tua maupun lingkungan sekitar.

Jumlah anak berkebutuhan khusus mencapai 813 pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 907, sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan walaupun tidak signifikan menjadi 904. Dari jumlah anak tersebut mereka merupakan anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Dari sekian banyak anak yang memiliki kebutuhan khusus, anak dengan tunagrahita merupakan anak yang sangat perlu diperhatikan. Gangguan dan ketidakmampuan mereka untuk berpikir secara normal menjadikan mereka sering menjadi korban eksploitasi dan kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

Kekurangan yang mereka miliki menjadikan mereka sangat lemah dalam hal apapun sehingga mereka seringkali menjadi korban. Keterbatasan ini seharusnya bukan menjadi alasan bagi mereka untuk menjadi korban baik korban eksploitasi maupun korban kekerasan. Mereka berhak atas penghidupan yang layak dan berhak meraih masa depan mereka dengan cara mereka sendiri. Itu semua karena, pada hakikatnya mereka adalah manusia yang memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang ingin mereka wujudkan.

Apalagi banyak diantara anak yang berkebutuhan khusus berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga mereka sering ditelantarkan dan tidak

diperhatikan. Kebutuhan mereka akan pendidikan inklusi sangat sulit untuk diwujudkan sedangkan mereka adalah anak Indonesia yang berhak atas pendidikan yang layak. Jangankan kebutuhan akan pendidikan mereka, untuk bertahan hidup sehari – hari mereka mengalami kesulitan seperti makanan yang bergizi, pakaian yang layak, rumah yang layak dan kebutuhan akan kesehatan mereka sering kali dinomorduakan, ini terjadi karena keluarga mereka bekerja keras untuk mencari nafkah dan bertahan hidup sehari – hari.

Keadaan ekonomi inilah yang sering kali menjadi alasan bagi anak – anak tunagrahita mengalami perlakuan yang tidak pantas. Selain itu, diantara mereka juga kadang kali berasal dari keluarga yang juga mengalami keadaan kecacatan yang sama sehingga tidak bisa mengurus mereka dengan baik.

Permasalahan yang dialami oleh anak tunagrahita tersebut perlu adanya peran dari Pemerintah untuk mengatasinya. Dalam hal ini diharapkan kerjasama dari semua pihak, karena masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melainkan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya untuk menampung anak-anak tunagrahita dan memberikan pemberdayaan.

Pemberdayaan tersebut bertujuan agar anak tunagrahita dapat memperbaiki kondisi menuju arah yang lebih baik, dan dapat lebih mandiri dalam menjalankan fungsi sosialnya. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang sosial khususnya dalam membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh tunagrahita dan Mahasiswa asuh. Tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya kepada anak tunagrahita agar anak tunagrahita mempunyai rasa percaya diri, mempunyai kemampuan, dan keterampilan sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut seperti Visi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan, yaitu “Terwujudnya kemandirian dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang tunagrahita melalui wujud usaha bersama pemerintah dan masyarakat”.

Pelaksanaan pemberdayaan anak tunagrahita di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan tidak begitu saja dilakukan, namun melalui tahapan. Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak UPTD adalah melakukan identifikasi, penelaahan dan

pengungkapan masalah yang dihadapi oleh anak tunagrahita. Tahap selanjutnya penerimaan anak tunagrahita melalui registrasi, pengasramaan dan penempatan anak tunagrahita kedalam kegiatan pembinaan. Selain mendapatkan pembinaan anak tunagrahita juga mendapatkan pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan jasmani (pangan, sandang, papan), pemenuhan kebutuhan spiritual, dan pelayanan kesehatan.

Pemberdayaan disini bukan membuat anak tunagrahita menjadi semakin bergantung kepada orang lain melainkan mereka akan menjadi lebih mandiri. Hal tersebut mengacu pada apa yang selalu dinikmati, apabila dihasilkan atau didapat melalui usaha dan jerih payah sendiri, maka kepuasan yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Dengan demikian, tujuan akhir yang didapat adalah memandirikan, dan membangun kemampuan kepada anak Tunagrahita untuk dapat memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Hal tersebut juga sangat penting untuk mengatasi ketidakmampuan yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, adanya kondisi kemiskinan dan keterbelakangan, serta adanya hambatan-hambatan bagi pemerintah untuk membagi wewenang dan sumber daya kepada anak tunagrahita dengan ketidakmampuan tersebut.

Penjelasan mengenai pemberdayaan anak penyandang tunagrahita di atas tersebut menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial mencakup seluruh elemen masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang memiliki status sebagai penyandang disabilitas. Intervensi yang diberikan untuk anak tunagrahita dalam kerangka pemberdayaan yang dilakukan oleh UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya adalah bimbingan mental spiritual yang berupa kegiatan mengaji, perayaan keagamaan, kegiatan Pondok Ramadhan yang bertujuan meningkatkan spiritualitas anak, bimbingan orientasi rehabilitasi dan orientasi mobilitas yang bertujuan memberikan terapi kepada anak berkebutuhan khusus untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan kemandirian anak, dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

Prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan anak adalah mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2017. Walaupun setiap tahunnya memenangkan penghargaan Kota Layak Anak namun pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan untuk kategori utama. Dalam salah satu kriteria menjadi kota layak anak ada kriteria yang mengharuskan tidak adanya diskriminasi terhadap pemenuhan hak – hak anak, hak – hak yang wajib dipenuhi adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

UPTD Pondok Sosial Kalijudan menjadi salah satu program unggulan dimana UPTD ini mampu menyamakan hak anak yang dulunya tidak bisa dicapai

oleh anak berkebutuhan khusus menjadi berhasil. Terutama mereka mewujudkan hak untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian maka anak berkebutuhan khusus di UPTD Pondok Sosial Kalijudan dapat mengembangkan bakat yang dia miliki dan mengangkat harkat dan martabat mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti Pemberdayaan yang dilakukan oleh UPTD Ponsos Kalijudan kepada anak – anak tuna grahita dilihat dari perspektif hirarki kebutuhan. sehingga dapat memberikan masukan untuk diambil tindakan korektif perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan apabila ditemukan kekurangan pada pelayanan yang dilakukan. Selain itu secara tidak langsung dengan menganalisis kualitas pelayanan publik pada UPTD ini, diharapkan dapat memberikan masukan ilmu yang baru bagi dunia pelayanan publik yang sedang berubah dan selalu berubah tentang bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Penelitian ini dianggap penting mengingat peran UPTD sebagai ujung tombak pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap para anak – anak tuna grahita di Surabaya yang terlantar.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Penyandang Tunagrahita dalam Perspektif Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan (UPTD Ponsos Kalijudan) Dinas Sosial Kota Surabaya dan proses pemberdayaan yang dilakukan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan dan sumbangan pengetahuan serta wawasan dalam bidang kajian pemberdayaan manusia khususnya dalam kajian Pemberdayaan manusia berkebutuhan khusus khususnya dalam hal pemberdayaan dan pengembangan kapasitas utamanya pada manusia yang memiliki kekurangan secara mental (Disabilitas). Sehingga dapat menjembatani antar kajian teoritis dengan fenomena empiris di lapangan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bahan masukan atau saran dalam melaksanakan kegiatan pembinaan anak tunagrahita pada umumnya dan memberikan kontribusi dan solusi yang mampu mengatasi masalah – masalah yang dimiliki UPTD Pondok Sosial Kalijudan Dinas Sosial Surabaya pada khususnya.

Hirarki Kebutuhan

Maslow menyusun teori motivasi manusia, dimana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hirarki atau berjenjang. Jenjang motivasi bersifat mengikat, maksudnya ; kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpenuhi sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang

jenjangnya lebih tinggi. Jadi kebutuhan fisiologis harus terpenuhi lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, baru muncul kebutuhan kasih sayang, begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar terpenuhi baru akan muncul kebutuhan meta.

Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif, tetapi kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam satu ketika dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Dalam mencapai kepuasan kebutuhan, seseorang harus berjenjang, tidak peduli seberapa tinggi jenjang yang sudah dilewati, kalau jenjang dibawah mengalami ketidakpuasan atau tingkat kepuasannya masih sangat kecil, dia akan kembali ke jenjang yang tak terpenuhi itu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang dikehendaki.

. Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Sesudah kebutuhan fisiologis terpenuhi secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan.

Sesudah kebutuhan fisiologis dari keamanan relatif terpenuhi, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Ada dua jenis cinta (dewasa) yakni Deficiency atau D-Love dan Beingatau B-love. D-love adalah cinta yang mementingkan diri sendiri, yang memperoleh daripada memberi. B-Love didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu.

Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif terpenuhi, kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada dua jenis harga diri : Menghargai diri sendiri (self respect) dan Mendapat penghargaan dari orang lain (respect from other).

Akhirnya sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan menjadi sesuatu yang orang itu mampu mewujudkannya secara maksimal seluruh bakat –kemampuannya potensinya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (Self fulfillment), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya.

Tunagrahita

Penyandang Cacat sekarang lebih dikenal dengan kata Disabilitas, karena kata cacat mengandung makna yang negatif seperti kurang memberdayakan sehingga kata cacat cenderung diganti dengan kata Disabilitas yang berasal dari kata Disable yang artinya

kurang mempunyai kemampuan. Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang No. 4 tahun 1997 didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang termasuk penyandang disabilitas dalam hal ini adalah penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang fisik dan mental.

Macam-macam penyandang cacat yaitu tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunadaksa dan tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Smart membagi penyandang tunagrahita kedalam beberapa karakteristik, yaitu: Keterbatasan inteligensi, yaitu kemampuan belajar anak sangat kurang terutama yang bersifat abstrak seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Keterbatasan sosial, yaitu anak tunagrahita yang mengalami hambatan dalam mengurus dirinya dalam kehidupan masyarakat. Keterbatasan fungsi mental lainnya, yaitu anak tunagrahita yang memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya.

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang diukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC) dalam Smart tunagrahita digolongkan menjadi empat golongan, yaitu: Pada kategori ringan memiliki IQ 50-55 sampai 70. Biasanya anak golongan ini mengalami kesulitan dalam belajar. Kategori sedang memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Pada golongan ini sering ditemukan kerusakan otak dan penyakit lain. Kategori berat Memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Penderita memiliki abnormalitas fisik bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas. Kategori sangat berat Pada kategori ini penderita memiliki IQ yang sangat rendah. Banyak penderita yang memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf

Pemberdayaan

Istilah Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu "empowerment" dan "empower" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, sama dengan memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (disadvantage). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produksi yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi

dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Suharto memaparkan pemberdayaan sebagai "Sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya.

Menurut John Friedman, Pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Bahkan dalam perspektif ilmu politik, kekuatan menyangkut pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan oleh individu, dalam keadaan tersebut masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol pada semua aspek kehidupannya.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian "proses" menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna "memperoleh" daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata "memperoleh" mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak

menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit.

Mengenai pemberdayaan masyarakat, Suharto menyatakan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan (Enabling), Penguatan (Empowering), Perlindungan (Protecting), Penyokongan (Supporting) dan Pemeliharaan (Fostering). Apabila konteks masyarakat yang dimaksud diimplementasikan ke dalam konteks organisasi sebagai sekumpulan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, maka pemberdayaan SDM bisa dicapai dengan pendekatan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling. Dalam mengkaji pemberdayaan Tunagrahita di UPTD Ponsos Kalijudan digunakan lima jenjang kebutuhan dan 5 dimensi pemberdayaan yaitu: Pemungkinan (Enabling), Penguatan (Empowering), Perlindungan (Protecting), Penyokongan (Supporting) dan Pemeliharaan (Fostering).

Pembahasan

Untuk mengetahui dan menggambarkan pemberdayaan tunagrahita di UPTD Ponsos Kalijudan maka peneliti menjabarkannya ke dalam lima jenjang kebutuhan menurut Maslow yaitu: fisiologis, keamanan, rasa memiliki dan cinta, harga diri dan Aktualisasi diri.

1) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan menjadi kebutuhan dasar bagi semua orang. Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti

makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan absolute (kelaparan dan kehausan) semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini.

UPTD Pondok Sosial Kalijudan memiliki 50 anak asuh yang berasal dari berbagai wilayah di Surabaya, mereka menjadi bagian dari anak asuh UPTD Pondok Sosial Kalijudan karena mereka terlantar dan berasal dari keluarga yang tidak mampu baik secara fisik dan materi. Selain itu anak – anak yang menjadi anak asuh dari UPTD Pondok Sosial Kalijudan berasal dari razia yang dilakukan oleh Satpol PP dimana saat razia dilakukan para anak Tunagrahita yang terjaring dalam razia langsung diserahkan kepada Pondok Sosial Keputih untuk didata dan kemudian disalurkan menuju pondok sosial lain yang dipisahkan khusus menurut jenis masalah sosial yang diderita.

Sama halnya dengan manusia biasa para penyandang tunagrahita khususnya anak – anak penyandang tunagrahita di UPTD Pondok Sosial Kalijudan juga membutuhkan asupan makanan dan minuman serta kebutuhan pokok lain yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Walaupun perkembangan otak anak – anak penyandang tunagrahita tidak bisa normal seperti anak – anak normal pada umumnya, namun sebagai kebutuhan pokok yang menunjang kehidupan manusia, kebutuhan fisiologis haruslah terpenuhi secara baik dan maksimal.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di UPTD Pondok Sosial Kalijudan, setiap anak – anak tunagrahita yang menjadi anak asuh diberikan tahap pelayanan pertama yang meliputi pemenuhan kebutuhan jasmani, spiritual dan kesehatan. Kebutuhan jasmani meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Kebutuhan spiritual meliputi bimbingan keagamaan dan rekreasi. Sedangkan kebutuhan kesehatan para anak – anak asuh UPTD Pondok Sosial Kalijudan secara berkala diperiksa oleh tenaga ahli berupa dokter.

Selain dengan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan dasar lain seperti rekreasi kebutuhan dasar lain seperti kebutuhan akan kesehatan sangatlah penting. Selain karena kondisi mereka yang banyak ditemukan terlantar di jalanan sehingga rentan akan penyakit yang ada, selain itu mereka yang terlantar karena memiliki orang tua yang terbatas dan kekurangan sehingga selama ini mungkin mereka belum dalam kondisi kesehatan yang baik.

Dengan bantuan dari Dinas Kesehatan maka UPTD Pondok Sosial Kalijudan melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan

secara berkala dan rutin terhadap semua anak asuh yang ada di UPTD Pondok Sosial Kalijudan. Setiap 3 kali dalam seminggu terdapat tenaga medis yang memeriksa kesehatan dari anak asuh disana.

2) Kebutuhan Keamanan

Kebutuhan keamanan dan kebutuhan fisiologis pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan kebutuhan keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Dengan terpenuhinya kebutuhan keamanan, maka kehidupan anak asuh akan menjadi lebih baik karena mereka dapat hidup dengan perasaan yang tenang dan terbebas dari trauma. Trauma tersebut disebabkan karena cerita masa lalu mereka yang beberapa pernah menjadi korban kekerasan dari orang tua mereka, tidak dianggap oleh keluarganya, dan diperlakukan dengan tidak layak sebagai manusia. Sehingga mereka kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga yang seharusnya menjaga, melindungi, dan menyayangi dengan tulus.

Selain itu para anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya juga menjadi korban eksploitasi untuk menjadi pengemis di jalanan. Sedangkan yang memaksa mereka untuk menjadi pengemis adalah dari keluarga mereka sendiri. Dengan adanya keadaan dan paksaan tersebutlah yang mengakibatkan para anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya merasa tidak aman dan cemas akan hal-hal tertentu.

Sehingga UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya memberikan perlindungan dengan menyediakan asrama dan tempat berlindung yang layak serta nyaman sehingga membantu secara psikologis para anak asuh. Para anak asuh juga terbebas dari ancaman keluarga yang telah memperlakukan mereka dengan tidak layak. Pihak keamanan juga bekerja 24 jam untuk menjaga anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Para tamu yang datang diharuskan untuk melapor terlebih dahulu kepada pihak keamanan. Hal ini bertujuan untuk mendata keperluan kedatangan para tamu dan menjaga anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya. Selain itu juga untuk mendata para tamu yang ingin memberikan sumbangan kepada UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya.

3) Kebutuhan Rasa Memiliki dan Cinta

Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki berdasarkan dari 2 jenis cinta yaitu deficiency atau D-Love yang berarti kebutuhan cinta karena kekurangan. Selanjutnya adalah being atau B-Love yang didasarkan pada penilaian apa adanya mengenai orang lain. Kebutuhan cinta oleh anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya adalah

kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dari orang terdekat yaitu keluarga dan teman. Hal tersebut dikarenakan mereka pernah mendapat penolakan dan dicerca oleh lingkungan keluarganya sehingga secara tidak langsung mereka kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya.

Dengan keadaan anak asuh yang seperti itu, maka pihak UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya memberikan pendamping selayaknya orang tua yang memberikan kasih sayang dan melindungi mereka. Pendamping bertugas secara khusus selama 24 jam. Pendamping akan dibagi sesuai dengan jenis kelamin/gender anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya. Jumlah anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya adalah 50 anak yang terbagi menjadi 32 anak asuh laki-laki dan 18 anak asuh perempuan.

Para anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya tidak hanya mendapat kasih sayang dan perlindungan dari para pendamping saja, tetapi juga dari seluruh pegawai di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya. Walaupun mereka tidak ditugaskan untuk hal tersebut, tetapi mereka rela untuk melakukan semua itu dikarenakan kepeduliannya melihat anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya.

4) Kebutuhan harga Diri

Kebutuhan harga diri akan muncul untuk menjadi kekuatan motivasi akan diri seseorang, tidak terkecuali dengan anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya. Kebutuhan harga diri dapat diketahui melalui menghargai diri sendiri (self respect) anak asuh UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya.

Menghargai diri sendiri (self respect) yang dilihat dari kebutuhan kekuatan, penguasaan, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya telah berhasil membuat anak asuhnya menjadi lebih mandiri dengan tidak bergantung pada orang lain. Walaupun yang mereka kerjakan masih terbatas, bersifat hafalan dan selalu diawasi, tetapi telah memberikan kemajuan untuk kehidupan anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya.

Kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya adalah mandi, makan, mencuci baju dan piring, serta bersih-bersih. Para anak asuh bergotong royong dan bertanggung jawab untuk membersihkan barang milik mereka sendiri. Apabila ada anak asuh yang mengalami cacat ganda dan tidak dapat melakukan kegiatan, maka anak asuh lainnya akan membantu menyelesaikan kegiatan tersebut. Seluruh kegiatan tersebut sudah cukup baik dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain oleh anak

kebutuhan khusus di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya.

Kemandirian anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya tidak terlepas dari bimbingan yang telah diberikan oleh para pendamping yang secara telaten mengajari mereka. Walaupun memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengajari anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya, tetapi akan tetap diberikan sampai mereka dapat mandiri seutuhnya.

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan meta dasar atau yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (self fulfillment), untuk menyadari potensi diri, menjadi kreatif dan bebas mencapai prestasi. Dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi diri diperlukan kebutuhan aktualisasi diri.

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan kreatif, realisasi diri, dan perkembangan diri untuk mencapai tujuan yang menjadi lebih baik. Walaupun anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan memiliki kekurangan, tetapi bukanlah menjadi halangan bagi mereka untuk mengekspresikan diri mereka. Dengan adanya UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya diharapkan dapat mengembangkan potensi anak asuh sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kebanyakan anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya menyukai seni seperti melukis, menyanyi, menari, dan kegiatan olahraga.

UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya memiliki cara untuk melihat minat dan bakat anak asuh dengan mencoba segala bentuk palatihan yang tersedia. Para anak asuh akan dibebaskan memilih kegiatan yang mereka sukai, kemudian nantinya UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya akan berusaha untuk melatih dan fokus mewujudkan minat yang dipilih anak asuh. Dengan begitu seluruh minat dan bakat anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya akan dapat tersalurkan dengan baik dan terarah sesuai dengan kemauan mereka.

Kegiatan yang ada di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya telah sesuai dengan kebijakan yang ada yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi UPTD Pondok Sosial Kalijudan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Namun UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya tidak memaksa anak asuhnya untuk melakukan kegiatan pelatihan dikarenakan emosi dan perasaan mereka yang masih labil. Selain itu juga terdapat anak asuh yang memiliki keterbatasan fisik sehingga memiliki untuk tidak mengikuti pelatihan di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya.

Kegiatan pelatihan ketrampilan dilakukan secara teratur yaitu seminggu 1-2 kali dengan jam yang menyesuaikan kondisi. Kegiatan

tersebut dilakukan di gedung serbaguna yang telah disediakan oleh UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya. Kegiatan pelatihan yang menjadi unggulan UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya adalah pelatihan melukis dikarenakan banyak mendapat apresiasi dari pihak luar. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya minat pembeli pada saat anak asuh mengikuti pameran. Walaupun lukisan yang anak asuh buat bukanlah lukisan yang sangat realistis, namun memiliki nilai seni yang tinggi.

Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan vokal atau band yang akan dipamerkan pada saat ada acara tertentu dari Pemerintah Kota Surabaya maupun UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya. Pelatihan ini diikuti oleh beberapa anak asuh yang tampil dalam band atau vokal saja. Para instruktur pengajar berasal dari Dinas Pariwisata Kota Surabaya.

Penampilan lainnya adalah menari yang sudah cukup sering mendapat undangan dari Dinas yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa anak asuh UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya merasa dihargai dan dibanggakan oleh orang lain. Sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan kebanggaan dalam diri mereka. Para anak asuh UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya akan terpacu untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki.

Kegiatan pelatihan pengembangan lainnya yang menjadi kebanggaan UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya selanjutnya adalah pelatihan handycraft berupa membatik. Para instruktur pengajar tidak hanya mengajarkan batik asal Indonesia saja tetapi juga seni membatik dari jepang yaitu shikori. Peminat membatik hampir setengah dari jumlah anak asuh di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya. Tetapi walaupun banyak peminat, kegiatan membatik merupakan salah satu kegiatan yang dapat memicu trauma anak asuh karena terkena lilin panas. Pelatihan membatik juga dapat memberikan keberhasilan dengan adanya batik yang laku dijual kepada pihak luar maupun dibeli oleh pihak UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya untuk dijadikan seragam.

Kegiatan pelatihan di bidang olahraga merupakan pelatihan yang menuai banyak prestasi ditingkat lokal. Olahraga yang menjadi unggulan di UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya adalah olahraga atletik dan tenis meja. Perlombaan yang sering anak asuh menangkan adalah yang diadakan oleh Universitas dan Pemerintah Kota Surabaya. Bahkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya, akan mengikutsertakan anak asuh dalam lomba tingkat Provinsi.

Dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan, UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya

telah memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup anak asuh. Sehingga kehidupan dan perkembangan diri anak asuh menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Dalam proses pemberdayaan anak tunagrahita masih mengalami beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan tersebut. Kendala pertama disebabkan karena instruktur pengajar mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan para anak tunagrahita. Kendala kedua yaitu emosi anak tunagrahita yang tidak stabil sehingga saat kegiatan pelatihan tidak seluruh anak asuh dapat mengikuti pelatihan. Kendala ketiga adalah UPTD Ponsos Kalijudan belum memiliki program keberlanjutan untuk anak asuh yang sudah beranjak dewasa. Kendala keempat adalah UPTD Ponsos Kalijudan Surabaya belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan formal dan keterampilan untuk anak asuh yang menginjak usia dewasa.

Kesimpulan

Pemberian kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti juga bermaksud memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait upaya pemberdayaan anak tunagrahita dalam mengembangkan potensi diri di UPTD Pondok Sosial Kalijudan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

Dari hasil penyajian data dan interpretasi teoritik maka peneliti dapat menyimpulkan kegiatan pemberdayaan dalam perspektif hirarki kebutuhan telah memenuhi kebutuhan para anak asuh, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan kasih sayang, harga diri serta pada tahap lanjut yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kegiatan pemenuhan kebutuhan ini sudah termasuk dalam pemberdayaan anak tunagrahita, karena mereka yang sebelumnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya selama ini kini telah terpenuhi. Walaupun berjalan efektif namun masih ada hal yang perlu diperbaiki agar UPTD Pondok Sosial Kalijudan menjadi lebih baik dalam pemberdayaan dan terkait dengan pemenuhan kebutuhan mereka.

Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan anak tunagrahita, UPTD Pondok Sosial Kalijudan juga menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut menjadikan kegiatan pemberdayaan menemui beberapa masalah. Masalah dalam pemberdayaan anak tunagrahita dalam pengembangan potensi diri diantaranya sulitnya komunikasi antara instruktur dan anak tunagrahita, perubahan emosi dari anak tunagrahita yang tidak stabil, belum adanya program tingkat lanjut khususnya bagi anak tunagrahita yang telah dewasa dan yang terakhir kurangnya perhatian UPTD pada pendidikan formal dan cenderung pada pendidikan informal.

IV.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki saran untuk Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam hal pemberdayaan anak tunagrahita dalam pengembangan potensi diri di UPTD Pondok Sosial Kalijudan supaya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa sarannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Dibuatnya kebijakan yang terkait dengan masa depan mereka terutama yang telah lewat usia anak – anak karena keterbatasan ruang dan sumberdaya yang dimiliki oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan. Sehingga jika ada anak tunagrahita terlantar yang ingin masuk kedalam UPTD bisa tertampung dan diberdayakan.
- 2) Pemberian kegiatan pelatihan yang bersiat formal seperti pelajaran agar mereka tidak saja pintar dalam hal informal tetapi juga dalam hal pendidikan formal.
- 3) Disediakan penerjemah bahasa isyarat agar anak tunagrahita yang menderita cacat ganda bisa diakomodir dan bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik dan nyaman.
- 4) Diadakan terapi secara rutin agar emosi anak tunagrahita menjadi stabil dan cenderung tenang. Tanpa adanya terapi tersebut maka proses pemberdayaan akan susah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Apriyanto, Nunung. 2012. *Seluk Beluk Tunagrahita & Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera.
- Creswell, John W. 2013. *Research Desighn*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Friedman, John. (1992) *Empowermwnt : The Tolitics of Alternative Development* . Massachussets: Blackwell Publisher
- Hikmat, Harry. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi)*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP) Penerbit Buku Pendidikan. Anggota IKAPI.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta. Erlangga.
- O'Reiley, Arthur. 2013. *Decent Work for People with Disabilities*. International Labour Organisation.
- Parson, Ruth J. 1994. *The Intgration of Social Work Practice*. California: Brooks/Cole.

-
- Prijono, dan Pranarka. 1996. Konsep-konsep Pemberdayaan. Merriam Webster dan Oxford English Dictionary.
- Situmorang, dan Sitanggang. 1994. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Smart, Aqila. 2010. Anak Cacat Bukan Kiamat “Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus”. Yogyakarta: Katahati.
- Suharto, Edi, Ph.D. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Yamoah, Emmanuel Erastus, 2014, The Link between Human Resource Capacity Building and Job Performanc, International Journal of Human Resource Studies, Vol. 4, No. 3. Andhika, Septyan Nur. 2015. Kualitas Pelayanan Jasa Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pada PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya. Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Undang-undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.
- Convention on the Right of Person with Disability, United Nation
- Decent Work for People with Disabilities. International Labour Organisation
- Lembaga Administrasi Negara, 2008, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Jakarta : LAN.
<https://www.kemsos.go.id/content/sasaran> diakses pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 19.00 WIB.
- <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/affirm/affirm.htm> diakses pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 20.13 WIB.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action> diakses pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 20.15 WIB.